



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Pelauw, 29 Maret 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Pelauw, 30 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 246/Pdt.P/2020/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 September 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 5 orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. Anak I;
  - 2.2. Anak II;
  - 2.3. Anak III;
  - 2.4. Anak IV;
  - 2.5. Anak V;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talab Latuconsina selaku petugas nikah dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Kolang Guru Salampessy selaku Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Bapak Ruslan Angkotasan dan Saraha Angkotasan;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemoh Agustus I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 September 1999 sesuai Syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi 1 umur XX Tahun, agama Islam, pekerjaan XX , tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sakai adalah saudara kandung dari Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 1999 di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan telah lahir 5 orang anak masing-masing bernama :
  - Anak I;
  - Anak II;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak III;

- Anak IV;

- Anak V;

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talab Latuconsina selaku Petugas Nikah pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Kolang Guru Salampessy, selaku ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak Ruslan Tuankotta dan Saraha Angkotasan;

- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Saksi 2 umur XX Tahun, agama Islam, pekerjaan XX , tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 1999 Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah dan telah lahir 5 orang anak masing-masing bernama :

- Anak I;

- Anak II;

- Anak III;

- Anak IV;

- Anak V;

- Bahwa saksi mengetahui saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talab Latuconsina selaku Petugas Nikah pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak Kolang Guru Salampessy, selaku ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak Ruslan Tuankotta dan Saraha Angkotasan;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon supaya perkawinan mereka diisbatkan/disahkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatka Akta Nikah;

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 14 September 1999 di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dengan Wali Nikah adalah Bapak Kolang Guru Salampessy, selaku ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak Ruslan Tuankotta dan Bapak Saraha Angkotasan, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 1999 di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Wali Nikah adalah Bapak Kolang Guru Salampessy, selaku ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat shalat dan telah di bayar tunai dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak Ruslan Tuankotta dan Bapak Saraha Angkotasan, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatska/disahkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdulah Tualeka bin Muhammad Tualeka) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 September 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1999 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Syaukany, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 316.000,00</u>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2020/PA.Ab